



**Judul** : Dapat suntikan modal, kinerja BUMN kudu lebih baik  
**Tanggal** : Kamis, 11 Juli 2024  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 8

## Dapat Suntikan Modal

# Kinerja BUMN Kudu Lebih Baik

Sebanyak 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta bantuan keuangan ke Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2024-2025. Perusahaan pelat merah tersebut butuh suntikan modal untuk memaksimalkan penugasan dari Pemerintah.

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, PMN yang diminta diperkirakan mencapai Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan. Mereka di antaranya, PT Hutama Karya sebesar Rp 13,86 triliun, PT Asabri sebesar Rp 3,61 triliun, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 1,8 triliun, PT Pelni (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun, PT Industri Kereta Api Rp 976 miliar, dan Perum Damri sebesar Rp 1 triliun.

Selain itu, ada juga BUMN yang meminta bantuan melalui cadangan investasi APBN 2024 senilai total Rp 13,6 triliun. Dana cadangan ini diusulkan beberapa

BUMN, seperti PT KAI sebesar Rp 2 triliun, PT INKA sebesar Rp 1 triliun, PT Pelni sebesar Rp 3 triliun.

Darmadi berharap, PMN ini harus benar-benar dimaksimalkan untuk membuka peluang mendapatkan ceruk pasar yang kini terbuka lebar di era globalisasi seperti saat ini. Untuk itu, perusahaan negara ini harus memiliki keinginan besar masuk dalam arena kompetisi pasar.

“Bukan malah stagnan lan-



**Darmadi Durianto**

hara Megawati Institute itu.

Darmadi mengingatkan, PMN

taran terus dimanjakan dengan adanya PMN. BUMN (penerima PMN) harus memastikan PMN ini membuat kinerja mereka terus meningkat,” kata Benda-

merugikan keuangan negara.

“Keterbukaan dan akuntabilitas harus menjadi pedoman yang jelas bagi BUMN yang mendapatkan PMN,” lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan ini pun mengingatkan, BUMN yang mendapatkan PMN harus mengungkapkan secara transparan penggunaan PMN itu. Transparansi ini penting sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat.

“Publik harus yakin bahwa PMN yang digelontarkan bisa berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” saran Darmadi.

Yang lebih penting dari itu, kata Darmadi, penggunaan PMN tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu atau *conflict of interest*.

“Karena itu, kebijakan yang diambil harus berdasarkan pada kriteria bisnis yang terukur dan memadai,” katanya.

BUMN yang mengusulkan PMN, lanjutnya, mesti dapat

meyakinkan Pemerintah bahwa kinerja operasional mereka dapat benar-benar optimal. Sebab, jika tidak dibarengi dengan keinginan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, dana PMN ini dikhawatirkan menguap begitu saja.

“Perlu pendekatan yang komprehensif agar PMN yang diberikan berdampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Salah satunya melalui transparansi tata kelola BUMN dan akuntabilitas dalam penggunaan PMN,” saran Darmadi.

Selain itu, BUMN juga perlu melakukan terobosan mencari sumber pembiayaan lainnya agar tidak terus bergantung kepada skema pembiayaan dari keuangan negara.

“BUMN dirancang untuk berkontribusi terhadap perubahan ekonomi dan memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat,” pungkasnya. ■KAL